



Judul : Satukan Visi Hadang Korupsi Kakap
Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2015
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 4

Satukan Visi Hadang Korupsi Kakap

DPR-GOPAC Bersiap Sidang ke-6 di Yogyakarta

JAKARTA-DPR RI menjadi tuan rumah Sidang Umum keenam GOPAC (*Global Conference of Parliamentarians Against Corruption*) yang dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta 5-8 Oktober 2015. Organisasi global yang didukung 170 orang anggota parlemen antikorupsi dari 50 negara, akan memberikan perhatian pada penanganan *grand corruption* (korupsi kakap) di bawah tema; *'Bringing Perpetrators of Grand Corruption to Justice for A Sustainable World where All Citizens Can Live in Prosperity and Equity'*

Sebelumnya dalam forum yang berlangsung di Panama, GOPAC

telah membuat resolusi agar UNCAC (Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi) dapat mengakui korupsi kakap sebagai salah satu kejahatan hak asasi manusia. Diusulkan pula agar proses peradilan korupsi dalam skala besar ini diselesaikan di *International Criminal Court* (Pengadilan Kriminal Internasional).

"Keterlibatan DPR dalam sidang GOPAC kali ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap resolusi tersebut dan juga sebagai tempat untuk mempelajari dan memperdalam mekanisme yang akan diajukan GOPAC," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10).

Dalam sidang di Yogyakarta ini lanjutnya DPR ingin menggali lebih dalam mengenai hal tersebut. Sejumlah referensi menunjukkan, membawa proses penuntutan ke-

jahatan korupsi ke level internasional memiliki beragam konsekuensi baik politis maupun legal. Dalam aspek legal misalnya, kerangka internasional yang seperti apa yang dibutuhkan untuk proses tersebut? Apakah melalui Mahkamah Pidana Internasional atau Pengadilan Internasional yang baru?

"Ini yang akan kita bahas secara khusus dalam sesi kedua konferensi bersama pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana dan John Hyde, Ketua GOPAC Oceania," tutur Fadli yang juga menjabat Ketua GOPAC *National Chapter Indonesia*.

Bahasan lain dalam sesi diskusi diantaranya tentang *'Tools and Mechanism to Build Anti-corruption Prevention System'* dan *'Paralysing Grand Corruption and Recovering Stolen Assets'*.

Bicara pada kesempatan berbe-

da Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen-BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Indonesia berhasil memasukkan persoalan biaya tinggi dalam demokrasi- *'The High Cost of Institutionalizing Democracy'* sebagai salah satu bahasan sesi diskusi. Seorang politisi seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk meminta sumbangan dari kepentingan khusus untuk membiayai kampanye pemilu yang mahal dan kemudian memiliki rasa kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada para penyumbang.

"Usulan DPR ini dibicarakan pada panel keenam. Kita akan membahas sisi buruk dari demokrasi dalam hal kampanye politik dengan biaya yang tinggi dan juga mencari kemungkinan pilihan dalam membuat proses demokrasi lebih efisien. Kita harapkan

ini juga akan menjadi forum pembelajaran dan sebagai tempat berbagi praktik terbaik bersama oleh anggota GOPAC," paparnya.

Sidang Umum keenam GOPAC juga menghadirkan sejumlah organisasi yang menjadi partner seperti PBB, IDB termasuk juga mendengar masukan dari lembaga antirasuah Indonesia-KPK dalam sesi diskusi yang mengusung tema *'Menyukseskan Tantangan SDG: Meningkatkan Efisiensi Bantuan Pembangunan Melalui Pengawasan Parlemen'*.

GOPAC, dalam kemitraan dengan Bank Pembangunan Islam dan *United Nations Development Programme* (UNDP), meluncurkan sebuah proyek untuk mendukung anggota parlemen meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan dana bantuan pembangunan. (dii/aen)